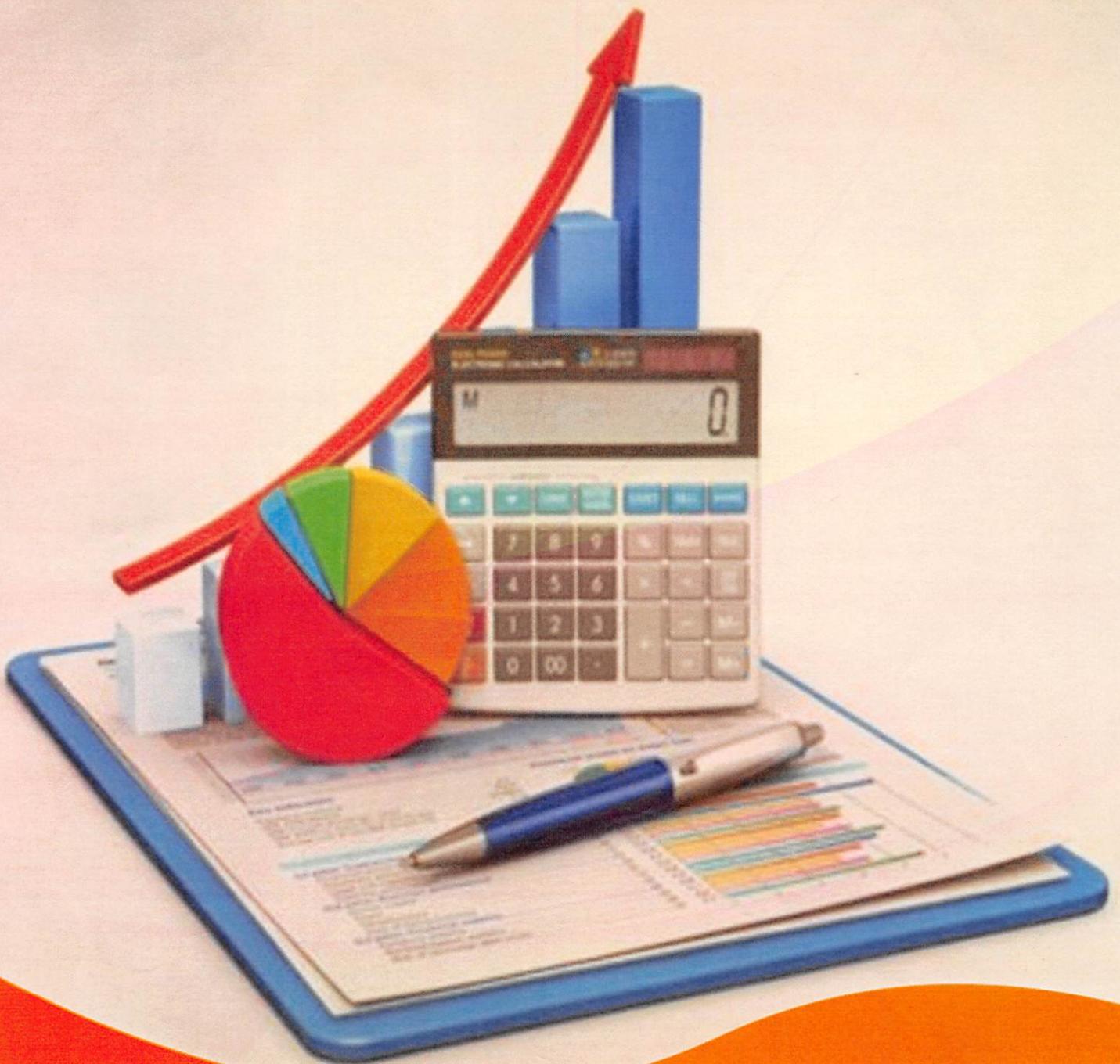




KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2013 AUDITED



Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-3905455 Fax : 021-3905455 PO BOX 2685
www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Pernyataan Telah Direviu	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Ringkasan Catatan atas Laporan Keuangan	
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.4. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	17
B.2. Belanja Negara	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	22
C.2. Aset Tetap	24
C.3. Aset Lainnya	30
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	33
C.5. Ekuitas Dana Lancar	35
C.5. Ekuitas Dana Investasi	36
D. Pengungkapan Penting Lainnya	
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	37
D.2. Pengungkapan Lain-lain	39
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	42

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012	2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	16
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	17
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2013 dan 2012	18
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2013	18
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	19
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012	19
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012	20
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012	21
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012	21
Tabel 13 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012	22
Tabel 14 : Rincian Persediaan	23
Tabel 15 : Rincian Aset Tetap	24
Tabel 16 : Rincian Saldo Tanah	24
Tabel 17 : Penambahan Peralatan Mesin	25
Tabel 18 : Kapitalisasi atas Belanja Barang	26
Tabel 19 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
Tabel 20 : Rincian Aset Lainnya	31
Tabel 21 : Rincian Ekuitas Dana Lancar	35
Tabel 22 : Rincian Ekuitas Dana Investasi	36

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 – Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	19



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

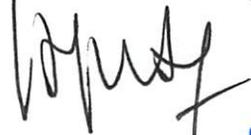
JL. KRAMAT RAYA NOMOR 57 JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178; FAKSIMILE (021) 31903644 www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 April 2014
Sekretaris Jenderal,


Danang Wijayanto 



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2013

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk tahun anggaran 2013 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 27 Februari 2014
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,



Roejito, S.Sos., M.Si.
NIP. 195909211982031004



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.210.012.315,00 atau mencapai ~ persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp.86.467.948.133,00 atau mencapai 94,41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.91.588.475.000,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0,00	210.012.315,00	0,00	209.865.777,00
Belanja Negara	91.588.475.000,00	86.467.948.133,00	94,41	75.729.494.968,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp128.714.583.219,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.849.216.831,00. Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp122.027.276.590,00. Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.838.089.798,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp89.062.147,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp128.625.521.072,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp4.760.154.684,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp123.865.366.388,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

Uralan	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	31 Des 2013 (Rp)	31 Des 2012 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	4.849.216.831,00	865.814.442,00	3.983.402.389	460.07
Aset Tetap	122.027.276.590,00	153.303.355.384,00	(31.276.078.794,00)	(20,40)
Aset Lainnya	1.838.089.798,00	1.827.059.981,00	(11.029.817,00)	0.60
Jumlah Aset	128.714.583.219,00	155.996.229.807,00	(27.281.646.588,00)	(17.48)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	89.062.147,00	11.203.459,00	77.858.688,00	694,95
Jumlah Kewajiban	89.062.147,00	11.203.459,00	77.858.688,00	694,95
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	4.760.154.684,00	854.610.983,00	3.905.543.701,00	456.99
Ekuitas Dana Investasi	123.865.366.388,00	155.130.415.365,00	(31.265.048.977,00)	(20,15)
Jumlah Ekuitas Dana	128.625.521.072,00	155.985.026.348,00	(27.359.505.276,00)	(17.53)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	128.714.583.219,00	155.996.229.807,00	(27.281.646.588,00)	(17.48)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	210.012.315,00	~	209.865.777,00
Jumlah Pendapatan	-	210.012.315,00	~	209.865.777,00
BELANJA				
Belanja Pegawai	9.111.060.000,00	9.068.853.519,00	99,54	8.742.781.026,00
Belanja Barang	77.418.203.000,00	72.383.977.476,00	93,50	63.773.494.771,00
Belanja Modal	5.059.212.000,00	5.015.117.138,00	99,13	3.213.219.171,00
Jumlah Belanja	91.588.475.000,00	86.467.948.133,00	94,41	75.729.494.968,00

II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam Rupiah)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	4.302.030.241,00	41.676.185,00	4.260.354.056,00	10.222,51
Persediaan	547.186.590,00	824.138.257,00	(276.951.667,00)	(33,60)
Jumlah Aset Lancar	4.849.216.831,00	865.814.442,00	3.983.402.389,00	460,07
Aset Tetap				
Tanah	47.188.389.400,00	47.188.389.400,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	35.897.228.395,00	31.500.734.142,00	4.396.494.253,00	13,95
Gedung dan Bangunan	70.623.104.266,00	70.471.586.566,00	151.517.700,00	0,21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	3.450.884.028,00	79.916.600,00	2,31
Aset Tetap Lainnya	741.191.281,00	691.761.248,00	49.430.033,00	7,14
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.000.000,00	0	29.000.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(35.982.437.380,00)	0,00	(35.982.437.380,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap	122.027.276.590,00	153.303.355.384,00	(31.276.078.794,00)	(20,40)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	1.838.089.798,00	1.524.651.246,00	313.438.552,00	20,55
Aset Lain-lain	0,00	302.408.735,00	(302.408.735,00)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	1.838.089.798,00	1.827.059.981,00	11.029.817,00	0,60
Jumlah Aset	128.714.583.219,00	155.996.229.807,00	(27.281.646.588,00)	(17,48)
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	16.161.480,00	11.203.459,00	4.958.021,00	44,25
Pendapatan di terima di muka	72.900.667,00	0,00	72.900.667,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	89.062.147,00	11.203.459,00	77.858.688,00	694,95
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar				
Cadangan Piutang	4.302.030.241,00	41.676.185,00	4.260.354.056,00	10.222,51
Cadangan Persediaan	547.186.590,00	824.138.257,00	(276.951.667,00)	(33,60)
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(89.062.147,00)	(11.203.459,00)	(77.858.688,00)	694,95
Barang/Jasa yang harus diserahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	4.760.154.684,00	854.610.983,00	3.905.543.701,00	456,99
Ekuitas Dana Investasi				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	122.027.276.590,00	153.303.355.384,00	(31.276.078.794,00)	(20,40)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1.838.089.798,00	1.827.059.981,00	11.029.817,00	0,60
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	123.865.366.388,00	155.130.415.365,00	(31.265.048.977,00)	(20,15)
Ekuitas Dana	128.625.521.072,00	155.985.026.348,00	(27.359.505.276,00)	(17,53)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	128.714.583.219,00	155.996.229.807,00	(27.281.646.588,00)	(17,48)



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

CALK – PENJELASAN UMUM

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI YUDISIAL RI

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Mejaiga kehormatan, keluhuan martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, trasnparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan berkompentensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan *Calon Hakim dan Hakim Agung* yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.
- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.

- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.
- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang
Jangka
Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

CALK – LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1 Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi

Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp210.012.315,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp210.012.315,00 atau mencapai ~ persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Komisi Yudisial RI adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2013		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
<i>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</i>	0,00	7.550.000,00	~
<i>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</i>	0,00	140.545.000,00	~
<i>Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu</i>	0,00	61.916.955,00	~
<i>Pendapatan Lain-lain</i>	0,00	360,00	~
<i>Jumlah</i>	0,00	210.012.315,00	~

Berdasarkan Tabel 6, Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN mengalami kenaikan 218,76 persen dibandingkan TA 2012 yang disebabkan:

1. Pembayaran sewa ruangan gedung KYRI sebesar Rp124.776.000,00 yang digunakan sebagai Kantor Cabang Pembantu Bank dan ruang ATM BRI dengan jangka waktu 24 bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 berdasarkan Perjanjian Sewa Ruang Kantor Gedung Milik Komisi Yudisial Republik Indonesia antara Komisi Yudisial RI dengan PT.Bank Rakyat Indonesia nomor:PERJ-01/SET.KY/I/2013 tanggal 2 Januari 2013;
2. Pembayaran sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp15.769.000,00 untuk Counter/Kios kantin dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai tanggal 2 September 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Halaman Untuk Counter/Kios kantin antara Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia (KPKY RI) nomor:PERJ-01/BU.KY/9/2013 tanggal 2 September 2013.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012

Uraian	Realisasi TA 2013	Realisasi TA 2012	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	7.550.000,00	57.200.000,00	(86,80)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	140.545.000,00	44.091.000,00	218,76
Pendapatan Denda	0,00	3.525.522,00	(100,00)
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lahu	61.916.955,00	105.049.255,00	(41,06)
Pendapatan Lain-lain	360,00	0,00	0,00
Jumlah	210.012.315,00	209.865.777,00	0,07

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja

Rp86.467.948.133,00

Realisasi belanja Komisi Yudisial RI pada TA 2013 adalah sebesar Rp86.467.948.133,00 atau sebesar 94,41 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp324.758.580,00. Anggaran Komisi Yudisial RI pada TA 2013 sebesar Rp91.588.475.000,00. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 menurut program tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013

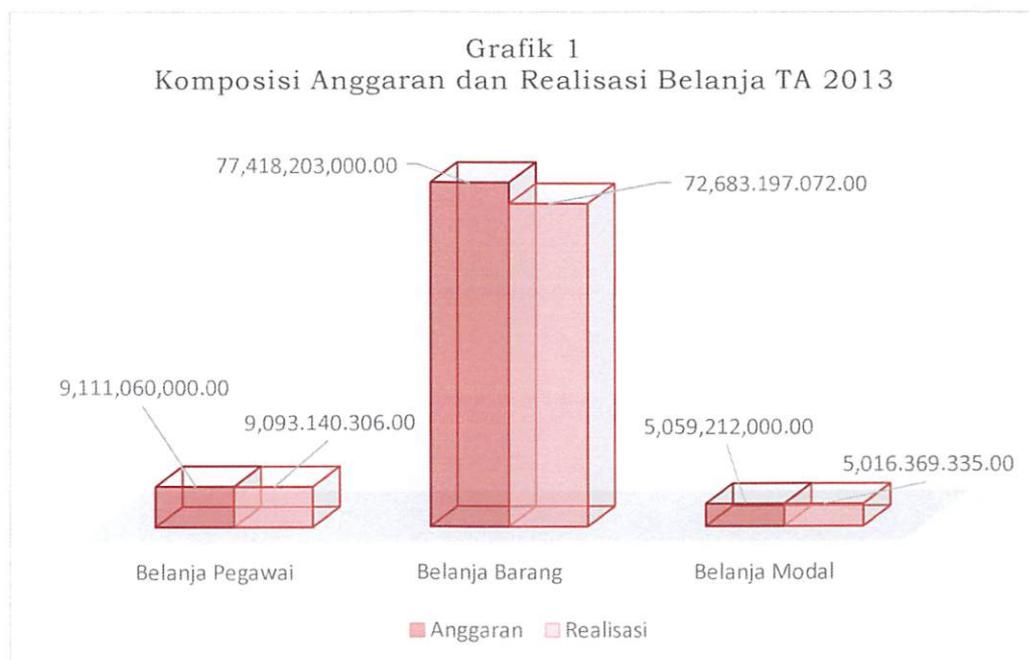
Kode	Uraian Program	Anggaran	Real TA 2013	% Realisasi terhadap Anggaran
01.01.01	Prog Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	51.683.983.000,00	49.702.751.249,00	96,17
01.03.02	Prog Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.344.782.000,00	6.206.386.298,00	97,82
03.03.06	Prog Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	33.559.710.000,00	30.558.810.586,00	91,06
Jumlah Belanja		91.588.475.000,00	86.467.948.133,00	94,41

Berdasarkan Tabel 8, Realisasi Belanja Netto mencapai 94,41 persen. Adapun realisasi Belanja Pegawai sebesar 99,80 persen, Belanja Barang sebesar 93,88 persen sedangkan Belanja Modal 99,15 persen.

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.111.060.000,00	9.093.140.306,00	99,80
Belanja Barang	77.418.203.000,00	72.683.197.072,00	93,88
Belanja Modal	5.059.212.000,00	5.016.369.335,00	99,15
Total Belanja Bruto	91.588.475.000,00	86.792.706.713,00	94,76
Pengembalian Belanja	-	(324.758.580,00)	-
Total Belanja Netto	91.588.475.000,00	86.467.948.133,00	94,41

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1.



Dibandingkan dengan TA 2012, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,18 persen, kenaikan realisasi terdapat pada seluruh jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang serta belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2013	Realisasi TA 2012	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	9.068.853.519,00	8.742.781.026,00	3,73
Belanja Barang	72.383.977.476,00	63.773.494.771,00	13,50
Belanja Modal	5.015.117.138,00	3.213.219.171,00	56,08
Jumlah Belanja	86.467.948.133,00	75.729.494.968,00	14,18

Belanja Pegawai
Rp9.068.853.519,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp9.068.853.519,00 dan Rp8.742.781.026,00. Terjadi kenaikan sebesar 3,73 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS. Rincian belanja pegawai disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2013	Realisasi TA 2012	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	4.329.675.250,00	4.012.612.840,00	7,90
Belanja Pembulatan Gaji PNS	96.270,00	86.801,00	10,91
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	242.596.120,00	207.100.016,00	17,14
Belanja Tunj. Anak PNS	51.644.532,00	43.813.479,00	17,87
Belanja Tunj. Struktural PNS	606.680.000,00	629.690.000,00	(3,65)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	20.545.000,00	7.345.000,00	179,71
Belanja Tunj. PPh PNS	89.915.829,00	147.824.172,00	(39,17)
Belanja Tunj. Beras PNS	240.987.780,00	199.040.650,00	21,07
Belanja Uang Makan PNS	713.845.000,00	770.740.000,00	(7,38)
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	17.062.200,00	0,00	~
Belanja Tunjangan Umum PNS	280.630.000,00	308.565.000,00	(9,05)
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	399.697.100,00	367.920.000,00	8,64
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	5.600,00	8.590,00	(34,81)
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	39.984.000,00	36.792.000,00	8,68
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	13.624.800,00	12.499.200,00	9,01
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	1.094.100.000,00	996.000.000,00	9,85
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	161.692.825,00	187.233.021,00	(13,64)
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	18.408.000,00	18.744.910,00	(1,80)
Belanja Uang Honor Tetap	771.950.000,00	798.770.000,00	(3,36)
Jumlah Belanja Bruto	9.093.140.306,00	8.744.785.679,00	3,98
Pengembalian Belanja Pegawai	(24.286.787,00)	(2.004.653,00)	1.111,52
Jumlah Belanja Netto	9.068.853.519,00	8.742.781.026,00	3,73

Belanja Barang
Rp72.383.977.476,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp72.383.977.476,00 dan Rp63.773.494.771,00 Realisasi Belanja barang mengalami kenaikan 13,50 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan realisasi Belanja Barang tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan realisasi Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Biasa serta Belanja Perjalanan Lainnya. Rincian Belanja Barang disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Keterangan	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik / Turun	Prosentase
Belanja Barang Operasional	6.575.539.419,00	6.208.559.029,00	366.980.390,00	5.91%
Belanja Barang Non-Operasional	23.992.252.031,00	23.685.985.270,00	306.266.761,00	1.29%
Belanja Jasa	7.392.684.299,00	6.676.427.775,00	716.256.524,00	10.73%
Belanja Pemeliharaan	7.157.666.205,00	6.722.725.961,00	434.940.244 ,00	6.47%
Belanja Perjalanan Dinas DN	27.565.055.118,00	20.622.268.754,00	6.942.786.364 ,00	33.67%
Realisasi Belanja Bruto	72.683.197.072,00	63.915.966.789 ,00	8.767.230.283,00	13.72%
Pengembalian Belanja	(299.219.596,00)	(142.472.018 ,00)	(156.747.578,00)	110.02%
Realisasi Belanja Netto	72.383.977.476,00	63.773.494.771,00	8.610.482.705,00	13.50%

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp5.015.117.138,00

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp5.015.117.138,00 dan Rp3.213.219.171,00 Terjadi kenaikan realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 56,08 persen. Kenaikan realisasi Belanja Modal tersebut antara lain disebabkan adanya belanja pengadaan peralatan dan mesin yaitu berupa Pengadaan Kendaraan Pemerintah sebanyak 6 Unit sesuai SPK No.Perj-067/SPK/PPK-1.KY/01/2013 tanggal 04 Januari 2013 dengan nilai kontrak Rp2.002.500.000,00. Rincian Belanja Modal disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2013	Realisasi TA 2012	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,785,097,220.00	2,164,074,720.00	74,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	473,222,700.00	875,081,900.00	(45,92)
Belanja Modal Lainnya	758,049,415.00	174,062,551.00	335,50
Jumlah Belanja Bruto	5,016,369,335.00	3,213,219,171.00	56,12
Pengembalian Belanja	(1,252,197.00)	0,00	~
Jumlah Belanja Netto	5,015,117,138.00	3,213,219,171.00	56,08



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

CALK – NERACA PER 31 DESEMBER 2013

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar

Rp4.849.216.831,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp4.849.216.831,00 dan Rp865.814.442,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No	NAMA AKUN	TA 2013	TA 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
3	Piutang Bukan Pajak	4.302.030.241,00	41.676.185,00
4	Persediaan	547.186.590,00	824.138.257,00
	Jumlah Aset Lancar	4.849.216.831,00	865.814.442,00

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Komisi Yudisial telah melakukan penyetoran ke Kas Negara terkait pengembalian sisa UP/TUP.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Piutang Bukan Pajak
Rp4.302.030.241,00

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp4.302.030.241,00 dan Rp41.676.185,00 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak terjadi sebagai akibat kelebihan pembayaran ULP dan ULS periode Mei-Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan Januari-Maret 2013 sebesar Rp4.302.030.241,00. Penjelasan lebih detail akan diungkapkan pada pengungkapan lain-lain didalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan
Rp547.186.590,00

C.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp547.186.590,00 dan Rp824.138.257,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Persediaan

No	Jenis	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012
1	Barang Konsumsi	294.262.452,00	473.137.018,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	8.947.400,00	31.015.940,00
3	Suku Cadang	0,00	34.012.650,00
4	Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	156.360.350,00	219.466.550,00
5	Persediaan Lainnya	87.616.388,00	66.506.099,00
Jumlah		547.186.590,00	824.138.257,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp122.027.276.590,00

C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp122.027.276.590,00 dan Rp153.303.355.384,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2012
1	Tanah	47.188.389.400,00	47.188.389.400,00
2	Peralatan dan Mesin	35.897.228.395,00	31.500.734.142,00
3	Gedung dan Bangunan	70.623.104.266,00	70.471.586.566,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	3.450.884.028,00
5	Aset Tetap Lainnya	741.191.281,00	691.761.248,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	29.000.000,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(35.982.437.380,00)	0,00
Jumlah		122.027.276.590,00	153.303.355.384,00

Tanah
Rp47.188.389.400,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp47.188.389.400,00 dan Rp47.188.389.400,00. Tidak terdapat perubahan aset tetap berupa tanah.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 terdiri dari:

Tabel 16
Rincian Saldo Tanah

No	Kode	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	5.780 m ²	47.188.389.400
Jumlah		5.780 m ²	47.188.389.400

Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp35.897.228.395,00 dan Rp31.500.734.142,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.342.805.530,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp26.554.422.865,00.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah
Saldo per 31 Desember 2012		31.500.734.142,00
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	4.366.809.450,00	
- Kapitalisasi terhadap belanja barang	30.937.000,00	
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Nilai	(1.252.197,00)	
Saldo per 31 Desember 2013		35.897.228.395,00

Transaksi mutasi penambahan peralatan dan mesin terdapat pada Tabel 17 dibawah ini:

Tabel 17
Penambahan Peralatan Mesin

Kode	Uraian Aset	Penambahan / (Pengurangan)	
		Unit	Rupiah
3.02.01.01.001	Sedan	6	2.002.500.000,00
3.02.02.01.010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	3	2.596.000,00
3.03.02.05.014	Crimping Tolls	1	4.937.500,00
3.03.03.01.064	Memori Programmer	10	49.500.000,00
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	2.350.000,00
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2	5.150.000,00
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	6	11.220.575,00
3.05.01.04.020	Lemari Display	1	3.915.000,00
3.05.01.05.010	White Board	2	1.700.000,00
3.05.01.05.048	LCD Projector / Infocus	2	13.640.000,00
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	25	51.371.012,00
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	38	28.404.241,00
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	7	47.141.435,00
3.05.02.01.009	Meja Komputer	1	21.978.000,00
3.05.02.01.021	Pot Bunga	6	11.220.000,00
3.05.02.01.028	Workstation	25	233.600.000,00
3.05.02.04.004	AC Split	14	59.881.500,00
3.05.02.04.005	Portabel AC	1	7.000.000,00

3.05.02.04.999	Alat Pendingan Lainnya	3	73.875.000,00
3.05.02.06.002	Televisi	5	17.240.000,00
	Dispenser	10	15.814.000,00
	Handy Cam	40	164.000.000,00
	Vertikal Blind	1	8.089.600,00
	Home Theater	1	2.300.000,00
	Multitrack Recorder	1	28.700.000,00
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Suply (UPS)	1	20.625.000,00
3.06.01.01.088	Voice Recorder	5	6.050.000,00
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	12.000.000,00
3.06.01.02.015	Video Mixer	1	32.900.000,00
3.06.01.02.128	Camera Digital	4	6.600.000,00
3.06.01.04.045	Mesin Barcode	2	3.500.000,00
3.06.02.01.010	Facsimile	10	13.936.500,00
3.06.03.14.999	Peralatan Translator UHF/VHF Lainnya	1	591.512.350,00
3.07.01.01.999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1	6.250.000,00
3.07.01.06.096	Ostocope Halogen Lamp	1	1.250.000,00
3.07.01.08.024	Nebulizer	1	1.336.500,00
3.07.01.10.033	HB Meter	1	1.485.000,00
3.07.01.11.147	Digitalc Signal Processor	1	8.937.500,00
3.10.01.02.001	PC Unit	41	339.157.500,00
3.10.01.02.003	Note Book	18	80.766.440,00
3.10.02.03.003	Printer	18	64.077.875,00
3.10.02.03.004	Scanner	9	17.740.922,00
3.10.02.03.015	External CD/DVD Drive (ROM)	1	385.000,00
3.10.02.03.017	External Hradisk	9	15.675.000,00
3.10.02.04.001	Server	1	198.000.000,00
3.10.02.04.024	Switch	3	76.500.000,00
Jumlah			4.366.809.450,00

Transaksi mutasi penambahan kapitalisasi terhadap belanja barang pada Tabel 18 dibawah ini:

Tabel 18
Kapitalisasi atas Belanja Barang

Uraian Aset	Penambahan / (Pengurangan)	
	Unit	Rupiah
Lemari Kayu	1	2.420.000,00
Papan Nama	6	2.100.000,00
Papan Gambar	6	8.080.000,00
Meja Kerja Kayu	2	18.337.000,00
Jumlah		30.937.000,00

Gedung dan
Bangunan
Rp70.623.104.266,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp70.623.104.266,00 dan Rp70.471.586.566,00.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2012	70.471.586.566,00
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	151.517.700,00
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan	0,00
Saldo per 31 Desember 2013	70.623.104.266,00

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- a. Transaksi Penyekatan Gedung Perumga di Lantai 3 Gedung Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.456/SPK/PPK-1.KY/5/2013 tanggal 07 Mei 2013, BAST No.456-B/BAST/PPBJ.KY/5/2013 tanggal 13 Mei 2013 dan Berita Acara Pembayaran No.456-C/BA.PEMB/PPK-1.KY/5/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan Nilai Kontrak Rp28.150.000,00
- b. Transaksi Pekerjaan Relayout Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim di Lantai 2 Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2013 sesuai SPK No.520/SPK/PPK-1.KY/5/2013 tanggal 31 Mei 2013, BAST No.520-B/BAST/PPBJ.KY/6/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan Berita Acara Pembayaran No.520-C/BA.PEMB/PPK-1/6/2013 tanggal 14 Juni 2013 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp61.044.700,00
- c. Transaksi Pekerjaan Relayout Biro Pengawasan Hakim Lantai 2 Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp50.423.000,00 sesuai SPK No.356/SPK/PPK-1.KY/4/2013 tanggal 16 April 2013, BAST No.356-B/BAST/PPBJ.KY/4/2013 tanggal 29 April 2013 dan Berita Acara Pembayaran No.356-C/BA.PEMB/PPK-1/4/2013 tanggal 30 April 2013 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp71.180.000,00

- d. Transaksi Pembayaran Honor Tim Teknis Pekerjaan Penataan Ruang Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp5.950.000,00
- e. Transaksi Pembayaran Honor Tim Teknis Penataan Ruang Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebesar Rp5.950.000,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp3.530.800.628,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp3.530.800.628,00 dan Rp3.450.884.028,00 Mutasi transaksi terhadap aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2012	3.450.884.028,00
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	79.916.600,00
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan	0,00
Saldo per 31 Desember 2013	3.530.800.628,00

Transaksi mutasi penambahan terhadap aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

- a. Pengadaan I-Security Box Modular sesuai SPK No.Perj-241/SPK/PPK-1.KY/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, BAST No.241-B/BAST/PPBJ.KY/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan Berita Acara Pembayaran No.241-C/BA.PEMB/PPK-1.KY/04/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp52.916.600,00
- b. Pengadaan Digital Subs Line Modul sesuai SPK No.387/SPK/PPK-1.KY/04/2013 tanggal 23 April 2013, BAST No.387-B/BAST/PPBJ.KY/04/2013 tanggal 29 April 2013 dan Berita Acara Pembayaran No.387-C/BA.PEMB/PPK-1.KY/04/2013 tanggal 30 April 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp27.000.000,00

Aset Tetap Lainnya
Rp741.191.281,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp741.191.281,00 dan Rp691.761.248,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan.

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2012	691.761.248,00
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	49.430.033,00
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan	0,00
Saldo per 31 Desember 2013	741.191.281,00

Transaksi mutasi penambahan terhadap aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun 2013, sesuai SPK No.Perj-292/SPK/PPK-4.KY/10/2013 tanggal 16 Oktober 2013, BAST No.1216/BAST/PPBJ.KY/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Pembayaran No.331/BA.PEMB/PPK-4.KY/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp49.430.033,00

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp29.000.000,00

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp29.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan pekerjaan perencanaan pembangunan atap lapangan tenis sesuai SPK No.176/SPK/PPK-1.KY/03/2013 tanggal 22 Maret 2014.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp35.982.437.380,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing (Rp35.982.437.380,00) dan (Rp0,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	47.188.389.400,00		47.188.389.400,00
2	Gedung dan Bangunan	70.623.104.266,00	(6.344.089.723,00)	64.279.014.543,00
3	Peralatan dan Mesin	35.897.228.395,00	(26.554.422.865,00)	9.342.805.530,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	(3.083.924.792,00)	446.875.836,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
6	Aset Tetap Lainnya	741.191.281,00	0,00	741.191.281,00
	Jumlah	157.980.713.970,00	(35.982.437.380,00)	121.998.276.590,00

Aset Lainnya
Rp1.838.089.798,00

C.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp1.838.089.798,00 dan Rp1.827.059.981,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Aset Lainnya

No	Jenis	Per 31 Desember 2013	Per 31 Desember 2012
1	Aset Tak Berwujud	1.838.089.798,00	1.524.651.246,00
2	Aset Lain-lain		302.408.735,00
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		0,00
Jumlah		1.838.089.798,00	1.827.059.981,00

Aset Tak Berwujud
Rp1.838.089.798,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp1.838.089.798,00 dan Rp1.524.651.246,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2012	1.524.651.246,00
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	313.438.552,00
Mutasi Kurang :	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
Saldo per 31 Desember 2013	1.838.089.798,00

Mutasi penambahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengadaan Microsoft Office Standar 2013 Berlisensi sesuai SPK No.322/SPK/PPK-1.KY/4/2013 tanggal 05 April 2013, BAST No.529-B/BAST/PPBJ.KY/4/2013 tanggal 18 April 2013, dan Berita Acara Pembayaran No.529-C/BA.PEMB/PPK-1.KY/4/2013 tanggal 22 April 2013 dengan Nilai Kontrak Rp187.669.020,00
- Pengadaan Penyediaan Paket Software Pendukung Aplikasi berupa Network Monitoring System Solarwinds Network Performance Monitor-SL 100 Up To 100 Elements sesuai SPK

No.Perj-280/SPK/PPK-1.KY/10/2013 tanggal 01 Oktober 2013, BAST No.1178/BAST/PPBJ.KY/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan Berita Acara Pembayaran No.324/BA.PEMB/PPK-1.KY/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan Nilai Kontrak Rp31.982.500,00

- Pengadaan Barang Inventaris Kantor berupa Operating Sistem Komisi Yudisial RI sesuai SPK No.884/SPK/PPK-1.KY/09/2013 tanggal 27 September 2013, BAST No.884-B/BAST/PPBJ.KY/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013, dan Berita Acara Pembayaran No.846-C/BA.PEMB/PPK-1.KY/10/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dengan Nilai Kontrak Rp67.100.000,00
- Pengadaan Software Pendukung Pengembangan Aplikasi Komisi Yudisial dan Memory Server IBM X3650 M3 Tahun 2013 sebesar Rp26.687.032,00 sesuai SPK No.Perj-282/SPK/PPK-1.KY/11/2013 tanggal 01 November 2013, BAST No.1176-B/BAST/PPBJ.KY/11/2013 tanggal 11 November 2013, dan Berita Acara Pembayaran No.326/BA.PEMB/PPK-4.KY/11/2013 tanggal 17 November 2013 dengan Nilai Kontrak Rp76.187.032,00

Aset Lain-Lain
Rp0,00

C.3.2 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp0,00 dan Rp302.408.735,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Komisi Yudisial RI serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2012	302.408.735,00
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	0,00
Mutasi Kurang :	
- Penghapusan BMN	302.408.735,00
Saldo per 31 Desember 2013	0,00

Transaksi pengurangan aset lain-lain sebesar Rp302.408.735,00 merupakan penghapusan Aset Tetap berupa:

Kode	Uraian Aset	Penambahan / (Pengurangan)	
		Unit	Rupiah
3.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portabel	1	1.150.000,00
3.05.01.04.003	Rak Besi	1	6.450.000,00
3.05.01.05.028	Overhead Projector	1	21.807.500,00
3.05.02.04.004	AC Split	1	6.125.135,00
3.05.02.06.020	Camera Video	2	26.650.000,00
3.05.02.06.068	DVD Player	2	985.000,00
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	1.272.000,00
3.06.02.01.010	Facimile	2	3.405.000,00
3.10.01.02.001	PC Unit	16	186.710.000,00
3.10.01.02.003	Note Book	2	15.641.600,00
3.10.02.03.003	Printer	5	26.142.500,00
3.10.02.03.004	Scanner	3	6.070.000,00
Jumlah			302.408.735,00

KEWAJIBAN

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek
Rp89.062.147,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp89.062.147,00. dan Rp11.203.459,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2013 muncul akibat adanya Utang kepada Pegawai.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp16.161.480,00

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp16.161.480,00 dan Rp11.203.459,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan). Adapun utang kepada pegawai sebagai berikut:

- a. Kekurangan Gaji Periode April s.d. Agustus Tahun 2013 an.Sukardi Sebesar Rp2.608.842,00
- b. Kekurangan Tunjangan Beras Periode Januari s.d. Oktober Tahun 2013 Sebesar Rp6.848.690,00
- c. Kekurangan Gaji Periode Oktober Tahun 2013 an.Patmoko Sebesar Rp235.664,00
- d. Kekurangan Tunjangan Beras Periode Januari s.d. September Tahun 2013 an.Patmoko Sebesar Rp64.108,00
- e. Kekurangan Tunjangan Beras Periode Januari s.d. Oktober Tahun 2013 an.Sukardi Sebesar Rp37.864,00
- f. Kekurangan pembayaran Langganan Kantor KY Periode Desember 2013 sebesar Rp442.072,00
- g. Kekurangan pembayaran langganan Kantor Penghubung KY di Mataram Periode Desember 2013 sebesar Rp35.700,00
- h. Kekurangan pembayaran pekerjaan penggandaan dokumen periode 13 s.d 31 Desember 2013 sebesar Rp5.888.540,00

*Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp72.900.667,00*

C.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp72.900.667,00 dan Rp0,00

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga berupa Penerimaan atas Sewa Gedung dan Bangunan Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas BRI dan Ruang ATM BRI sebesar Rp62.388.000,00 dan penerimaan dimuka atas sewa halaman parkir gedung KY RI untuk Kantin sebesar Rp10.512.667,00.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar
Rp4.760.154.684,00

C.5 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Cadangan Piutang	4.302.030.241,00	41.676.185,00
2	Cadangan Persediaan	547.186.590,00	824.138.257,00
3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(16.161.480,00)	(11.203.459,00)
4	Barang/Jasa yang harus diserahkan	(72.900.667,00)	0,00
	<i>Jumlah</i>	4.760.154.684,00	854.610.983,00

Cadangan Piutang
Rp4.302.030.241,00

C.5.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp4.302.030.241,00 dan Rp41.676.185,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Komisi Yudisial RI dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan
Rp547.186.590,00

C.5.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp547.186.590,00 dan Rp824.138.257,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Komisi Yudisial RI dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
(Rp16.161.480,00)

C.5.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing disajikan minus sebesar Rp16.161.480,00 dan Rp11.203.459,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Barang/Jasa yang
harus diserahkan
(Rp72.900.667,00)

C.5.4 Barang/Jasa yang harus diserahkan

Jumlah Barang/Jasa yang harus diserahkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing disajikan minus sebesar Rp72.900.667,00 dan Rp0,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana
Investasi
Rp123.865.366.388,00

C.6 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22
Rincian Ekuitas Dana Investasi

No	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	122.027.276.590,00	153.303.355.384,00
2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1.838.089.798,00	1.827.059.981,00
Jumlah		123.865.366.388,00	155.130.415.365,00

Diinvestasikan dalam
Aset Tetap
Rp122.027.276.590,00

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp122.027.276.590,00 dan Rp153.303.355.384,00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya
Rp1.838.089.798,00

C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.838.089.798,00 dan Rp1.827.059.981,00.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

CALK – PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

a. Penerimaan Dana Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Pada Tahun 2013 Komisi Yudisial RI menerima Hibah Jasa dari *United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)* dalam bentuk pekerjaan Analisa Kebutuhan Penanganan Laporan Masyarakat dan Pelatihan pada Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat Biro Pengawasan Hakim. Hibah Jasa tersebut berdasarkan dokumen proyek IDN X27 Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase III. Komisi Yudisial RI menerima hibah jasa sebesar USD51.687,93 (lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh dollar sembilan puluh tiga sen) atau setara dengan Rp577.612.616,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai	
		USD	Rupiah
1	Konsinyering III (7 s.d. 9 April 2013) Pembahasan analisa kebutuhan penanganan laporan masyarakat dan penyusunan draft sementara kurikulum dan materi ajar pelatihan.	3.627,44	40.536.642,00
2	Konsinyering IV (12 s.d. 14 Mei 2013) Tindak lanjut perumusan kurikulum dan materi ajar pelatihan Penanganan Laporan Masyarakat.	4.816,34	53.822.599,00
3	Konsinyering V (23 s.d. 25 Mei 2013) Perumusan persamaan persepsi, penentuan pengajar, dan finalisasi bahan ajar serta jadwal pelatihan terhadap materi ajar pelatihan penanganan laporan masyarakat.	8.025,74	89.687.644,00
4	FGD III (19 s.d. 21 Maret 2013) Melakukan wawancara kepada narasumber dalam rangka pengumpulan informasi untuk penyusunan analisa kebutuhan pengolahan laporan masyarakat.	1.955,06	21.847.795,00

5	FGD V (7 Juni 2013) Pemaparan materi ajar pelatihan, dan persiapan para pengajar, pendamping, serta observer dalam pelaksanaan pelatihan.	2.717,19	30.364.598,00
6	Pelatihan di Bogor (14 s.d. 17 Juli 2013).	25.736,04	287.600.247,00
7	Penulisan Laporan (11 s.d. 13 Juli 2013).	4.810,12	53.753.091,00
Jumlah		51.687,93	577.612.616,00

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen pada tanggal 30 Desember 2013 menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dengan identitas dokumen sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : Komisi Yudisial RI
 Nama dan Kode Satker : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial/439479
 Donor : UNODC Kantor Perwakilan Indonesia
 Nomor Register /Grant ID : 74763301/LODC0001
 Nomor dan tanggal SP3HL-BJS : 0584/PU.6/2013 tanggal 30 Desember 2013
 Nilai SP3HL-BJS yang disahkan : Rp577.612.616,00

- b. Pada Tahun 2013 Komisi Yudisial RI menerima Hibah langsung berbentuk barang dan jasa dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) terdiri dari 5 (lima) set peralatan system perekaman audio Video Persidangan sesuai BAST No.1261-A/BAP/PPBJ.KY/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dan 5 (lima) kegiatan sesuai BAST /BAST/KET.SET/I/2014 Bulan Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Sosialisasi kegiatan di 4 Wilayah (Makassar, Medan, Mataram dan Semarang)	114.358.307,00
2	Konsiyering finalisasi materi dan persiapan pelatihan penghubung	39.576.190,00
3	Pelatihan teknis pemantauan dan penggunaan ARAV	346.503.125,00
4	Penyusunan SOP penggunaan ARAV (Jasa Konsultan)	30.000.000,00
5	Penyusun Materi Optimalisasi pengelolaan hasil rekaman dengan ARAV melalui proses editing dan procesing	13.000.000,00
J U M L A H		543.437.622,00

Komisi Yudisial masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk proses register hibah tersebut.5 (lima) set peralatan tersebut dimanfaatkan Oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Kantor Penghubung di Surabaya, Semarang, Medan, Makkasar, Mataram dan Samarinda. Berdasarkan surat ketua TIM AIPJ No.268/I/AIPJ/2014 tanggal 5 Februari 2014 menyebutkan bahwa peralatan system perekaman tersebut merupakan pinjaman AusAid Kepada Komisi Yudisial hingga berakhir program AIPJ atau sampai dengan ada Pemberitahuan lebih lanjut.

D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Pada tanggal 29 Agustus 2013 Ketua Komisi Yudisial RI Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. melantik Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Danang Wijayanto, Ak., M.Si. menggantikan Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si . Penunjukan Danang Wijayanto, Ak., M.Si. dalam Jabatan Eselon IA dengan Pangkat Pembina Utama Muda IVc tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96/M/2013 tanggal 23 Agustus 2013
- b. Berdasarkan hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (operasional) semester I tahun 2013 yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal sebagaimana tertuang dalam surat Managemen Letter Nomor 002/LHA/RENKI-2.KY/11/2013 tanggal 6 November 2013, dilaporkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran ULP dan ULS bagi pejabat/pegawai Komisi Yudisial atas nama Sdr.AJK periode Januari-Maret 2013 sebesar Rp207.577.600,00
Atas dasar temuan audit operasional tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus sesuai surat tugas Sekretaris Jenderal Nomor 613/GAS/SET.KY/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pembayaran ULP/ULS bagi pejabat/pegawai Komisi Yudisial tahun 2011 dan 2012 (tugas pemeriksaan khusus dilakukan mendahului laporan audit/management letter karena sudah ada dugaan kuat adanya penyimpangan terkait pembayaran ULP

dan ULS). Dari hasil pemeriksaan khusus tersebut diketahui bahwa pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial atas nama Sdr.AJK telah melakukan penyalahgunaan jabatan/kewenangan berupa melakukan manipulasi/rekayasa daftar rekapitulasi penerimaan pembayaran ULP dan ULS tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp3.014.578.545,00.

Pada saat pemeriksaan khusus berlangsung, Tim menemukan bukti kembali adanya kelebihan pembayaran ULP dan ULS periode Mei-Desember 2009, Januari-Oktober 2010 sebesar Rp943.125.196,00 dan November – Desember 2010 sebesar Rp344.326.500,00.

Dengan demikian total jumlah kerugian negara yang terjadi sebagai akibat kelebihan pembayaran ULP dan ULS periode Mei-Desember 2009, Januari-Oktober 2010, 2011, 2012 dan Januari-Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam laporan pemeriksaan khusus Nomor 001/LHA/RENKI-2.KY/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp4.509.607.841,00.

Bahwa Sdr.AJK telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran ULP dan ULS periode Januari-Maret 2013 dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp207.577.600,00 dengan nomor bukti surat setoran pengembalian belanja (SSPB) nomor NTPN 0908000206140505 tanggal 12 November 2013 melalui Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta dan tanggal 28 Februari 2014 menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp103.557.600,00 dengan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) No NTPN 0508130407140514 melalui Bank Panin.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta IV Nomor BA-4242/BPB.XII/KP.0440/2013 setoran tersebut tidak terdapat dalam pencatatan KPPN Jakarta IV.

Namun demikian setelah dilakukan pengecekan kembali ke pihak Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta, pihak Bank Mandiri melalui surat Nomor 4.Br.JJD/036/2014 tanggal 21 Februari 2014 memberikan klarifikasi bahwa setoran negara

pengembalian belanja sebagaimana tersebut di atas memang benar adanya dan telah dilaporkan ke pihak KPPN Jakarta IV dan hal tersebut diakui oleh pihak KPPN.

Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Sekretaris Jenderal melimpahkan penanganan selanjutnya kepada pihak berwajib dalam hal ini Kejaksaan Agung melalui surat nomor 213/SET.KY/01/2014 tanggal 27 Januari 2014.

c. Pembentukan Kantor Penghubung

Pada tanggal 23 April Tahun 2013 Komisi Yudisial membuka Pengumuman Penerimaan Petugas Penghubung Komisi Yudisial untuk wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan periode 2013-2014. Status kepegawaian dari Petugas Penghubung adalah Pegawai Komisi Yudisial Non PNS. Pembentukan Petugas Penghubung ini didasarkan atas Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah. Petugas Penghubung terdiri atas 1 (satu) orang koordinator dan paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu diantaranya bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung.



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI

NERACA PER 31 DESEMBER 2013
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2013

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
Tanggal : 01/05/14
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI YUDISIAL RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	4,302,030,241	41,676,185	4,260,354,056	10,222.51
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0.00
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>4,302,030,241</i>	<i>41,676,185</i>	<i>4,260,354,056</i>	<i>10,222.51</i>
Persediaan	547,186,590	824,138,257	(276,951,667)	(33.60)
JUMLAH ASET LANCAR	4,849,216,831	865,814,442	3,983,402,389	460.07
ASET TETAP				
Tanah	47,188,389,400	47,188,389,400	0	0.00
Peralatan dan Mesin	35,897,228,395	31,500,734,142	4,396,494,253	13.95
Gedung dan Bangunan	70,623,104,266	70,471,586,566	151,517,700	0.21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,530,800,628	3,450,884,028	79,916,600	2.31
Aset Tetap Lainnya	741,191,281	691,761,248	49,430,033	7.14
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29,000,000	0	29,000,000	0.00
Akumulasi Penyusutan	(35,982,437,380)	0	(35,982,437,380)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	122,027,276,590	153,303,355,384	(31,276,078,794)	(20.40)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,838,089,798	1,524,651,246	313,438,552	20.55
Aset Lain-lain	0	302,408,735	(302,408,735)	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	1,838,089,798	1,827,059,981	11,029,817	0.60
JUMLAH ASET	128,714,583,219	155,996,229,807	(27,281,646,588)	(17.48)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16,161,480	11,203,459	4,958,021	44.25
Pendapatan Diterima Dimuka	72,900,667	0	72,900,667	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	89,062,147	11,203,459	77,858,688	694.95
JUMLAH KEWAJIBAN	89,062,147	11,203,459	77,858,688	694.95
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	4,302,030,241	41,676,185	4,260,354,056	10,222.51
Cadangan Persediaan	547,186,590	824,138,257	(276,951,667)	(33.60)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(89,062,147)	(11,203,459)	(77,858,688)	694.95
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	4,760,154,684	854,610,983	3,905,543,701	456.99
EKUITAS DANA INVESTASI				

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(DALAM RUPIAH)

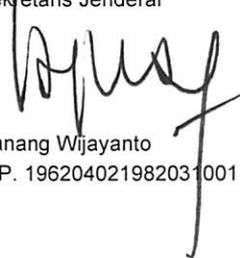
Kode Laporan : NSAIE1T
 Tanggal : 01/05/14
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
 UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI YUDISIAL RI
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	122,027,276,590	153,303,355,384	(31,276,078,794)	(20.40)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	1,838,089,798	1,827,059,981	11,029,817	0.60
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	123,865,366,388	155,130,415,365	(31,265,048,977)	(20.15)
JUMLAH EKUITAS DANA	128,625,521,072	155,985,026,348	(27,359,505,276)	(17.53)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	128,714,583,219	155,996,229,807	(27,281,646,588)	(17.48)

Jakarta, 30 April 2014

Sekretaris Jenderal


 Danang Wijayanto
 NIP. 196204021982031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
 ESELON I : 01 KOMISI YUDISIAL RI
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISAS ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	0	210,012,315	210,012,315	0.00
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	210,012,315	210,012,315	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	210,012,315	210,012,315	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS	0	0	0	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00
	2. HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)	0	210,012,315	210,012,315	0.00
B	BELANJA				
	I BELANJA TRANSAKSI KAS	91,588,475,000	86,467,948,133	(5,120,526,867)	94.41
	Belanja Pegawai	9,111,060,000	9,068,853,519	(42,206,481)	99.54
	Belanja Barang	77,418,203,000	72,383,977,476	(5,034,225,524)	93.50
	Belanja Modal	5,059,212,000	5,015,117,138	(44,094,862)	99.13
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	II BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00
	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00
	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00
	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	91,588,475,000	86,467,948,133	(5,120,526,867)	94.41
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, 30 April 2014

Sekretaris Jenderal



Danang Wijayanto
 NIP. 196204021982031001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
ESELON I : 01 KOMISI YUDISIAL RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 01 Mei 2014
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2013				2012			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	0	210,012,315	210,012,315	0.00	0	209,865,777	209,865,777	0.00
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	0	210,012,315	210,012,315	0.00	0	209,865,777	209,865,777	0.00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	210,012,315	210,012,315	0.00	0	209,865,777	209,865,777	0.00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	0	210,012,315	210,012,315	0.00	0	209,865,777	209,865,777	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	91,588,475,000	86,467,948,133	(5,120,526,867)	94.41	77,487,326,000	75,729,494,968	(1,757,831,032)	97.73
B.I.1	Rupiah Mumi	91,588,475,000	86,467,948,133	(5,120,526,867)	94.41	77,487,326,000	75,729,494,968	(1,757,831,032)	97.73
B.I.1.a	Belanja Pegawai	9,111,060,000	9,068,853,519	(42,206,481)	99.54	8,890,452,000	8,742,781,026	(147,670,974)	98.34
B.I.1.b	Belanja Barang	77,418,203,000	72,383,977,476	(5,034,225,524)	93.50	65,365,618,000	63,773,494,771	(1,592,123,229)	97.56
B.I.1.c	Belanja Modal	5,059,212,000	5,015,117,138	(44,094,862)	99.13	3,231,256,000	3,213,219,171	(18,036,829)	99.44
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
ESELON I : 01 KOMISI YUDISIAL RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 01 Mei 2014
Halaman : 2
ProgId : lu_pastkt

No	URAIAN	2013		2012	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0
B.11	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0
B.11.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0
B.11.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0
B.11.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0
B.11.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0
B.11.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0
B.11.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0
B.11.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0
B.11.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA (B.1 + B.11)		91,588,475,000	(86,467,948,133)	77,487,326,000	(75,729,494,968)
C	PEMBAYARAN	0	0	0	0
C.1	PEMBAYARAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0
C.11	PEMBAYARAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0
C.11.1	Perbankan Luar Negeri	0	0	0	0
C.11.1	Perbankan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0
C.11.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0
JUMLAH PEMBAYARAN (C.1 + C.2)		0	0	0	0

Jakarta, 30 April 2014

Sekretaris Jenderal

Danang Wijayanto

NIP. 196204021982031001